KERJASAMA EKONOMI INDONESIA-SINGAPURA DALAM PENGEMBANGAN *SPECIAL ECONOMIC ZONE* DI WILAYAH BATAM, BINTAN DAN KARIMUN SETELAH DIBERLAKUKANNYA *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY* TAHUN 2006-2017

Indra Hernawan

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia
Jalan Dipati Ukur No. 112 Bandung 40132 Indonesia

E-mail: indrahernawan08@gmail.com

ABSTRACT

This reasearch aims to determine the economic cooperation between Indonesia and Singapore in the development of Special Economic Zones (SEZ) in Batam, Bintan and Karimun (BBK) after the enactment of ASEAN Economic Community (AEC) in 2006-2017. To answer that question, the researchers conducted an analysis of the results of the economic cooperation between Indonesia and Singapore in SEZ development in BBK area after the enactment of AEC.

The research method used in this research is qualitative method. In a collection of data the researchers conducted field studies, literature studies, online searching and using purposive techniques to determine sources. The technique for analyzing data using triangulation data.

The results of this study to analyze the incidence and how the economic cooperation between Indonesia and Singapore in the development of SEZ in BBK after the enactment of AEC. Cooperation is also a rationale used by the Researchers to compare between the prevailing theory and the implemented government of Indonesia in the field. The conclusion of this study shows that in the context of bilateral relations, the economic cooperation between Indonesia and Singapore complement each other. The presence of AEC makes SEZ more needed. Cooperation plays an important role in international relations. Cooperation undertaken and required by the state as a means to achieve national interest in establishing relationships between nations.

Keywords: Indonesia, Cooperation, Singapore, KEK, MEA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2006-2017. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti melakukan analisis mengenai hasil dari kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan KEK di wilayah BBK setelah diberlakukannya MEA.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan studi lapangan, studi pustaka, penelusuran *online* dan menggunakan teknik *purposive* untuk menentukan narasumber. Sedangkan teknik untuk menganalisis data menggunakan triangulasi data.

Hasil penelitian ini menganalisa pengaruh serta bagaimana prospek kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan KEK di BBK setelah diberlakukannya MEA. Kerjasama juga menjadi dasar pemikiran yang digunakan peneliti untuk membandingkan antara teori yang berlaku dengan yang diimplementasikan pemerintah Indonesia di lapangan. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa dalam konteks hubungan bilateral, kerjasama ekonomi Indonesia dan Singapura saling melengkapi satu sama lain.

Hadirnya MEA menjadikan KEK lebih dibutuhkan. Kerjasama sangat berperan di dalam hubungan internasional. Kerjasama dilakukan dan diperlukan oleh negara sebagai sarana untuk mencapai kepentingan nasional dalam menjalin hubungan antar bangsa.

Kata Kunci : Indonesia, Kerjasama, Singapura, KEK, MEA

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Setiap negara semakin tidak bisa mengabaikan interaksi ekonomi dengan negara lainnya, dikarenakan adanya interdependensi dari negera-negara dalam kehidupan dunia internasional, oleh sebab itu terciptanya kerjasama saling menguntungkan antar negara pelaku ekonomi. Indonesia dan Singapura merupakan dua negara yang saling berdekatan dengan jarak 12,5 mil laut bila di hitung dari Batam dan berada di wilayah yang sangat strategis di kawasan Asia Tenggara, tepatnya pada jalur pelayaran internasional paling ramai di dunia (selat malaka) dan menghubungkan dua benua besar seperti Eropa dan Asia (http//www.skpd.batamkota.go.id/bapeda/files/2010/014.Sejarah-Singkat.pdf diakses pada 03 April 2017).

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Indonesia dan Singapura mengenai Kerangka Kerjasama KEK di Batam, Bintan dan Karimun telah berlangsung sejak tanggal 25 Juni 2006 di Nongsa Point Marina Batam dan ditandatangani oleh Menko Perekonomian, Boediono dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura, Lim Hing Kiang serta disaksikan langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono bersama Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong (http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaranpers/Pages/Indonesia-dan-Singapura-Tandatangani-Kerangka-Kerjasama-Ekonomi-untuk-Pulau-Batam -Bintan-dan-Karimun.aspx diakses 27 Maret 2017).

Pembentukan KEK itu sendiri merupakan bagian dalam menjalankan strategi industrialisasi berbasis ekspor yang diharapkan dapat menarik aliran modal internasional dan merupakan bagian utama dari investasi asing. Sementara bagi kota Batam hadirnya *ASEAN Economic Community* (AEC), ternyata memiliki keuntungan tersendiri. Mengingat saat ini, Batam sudah dikenal sebagai kawasan Perdagangan. Sejauh ini Batam sudah banyak menampung investor asing, 65 persen Investor dari Singapura dan selebihnya dari negara-negara lain (http://humasotoritabatam.blogspot.co.id/2016/02/jadi-ka wasan-mea-ini-keunt ungan.html diakses pada 28 Maret 2017).

MEA memiliki 4 (empat) karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi *global*. Empat karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN diantaranya, Pasar Tunggal dan Basis Produksi (aliran barang bebas, aliran bebas sektor jasa, aliran bebas investasi, aliran modal yang lebih bebas, arus bebas tenaga kerja terampil, sektor prioritas integrasi, pangan pertanian dan kehutanan), Kawasan Ekonomi yang Kompetitif (kebijakan persaingan usaha, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, *E-Commerce*), Pembangunan Ekonomi yang setara (pengembangan UKM, inisiatif integrasi ASEAN), Integrasi ke dalam Ekonomi *Global* (pendekatan koheren terhadap hubungan ekonomi eksternal, Peningkatan partisipasi dalam jaringan *supply global*) (Kemlu, 2015: 39).

Tabel 1.1 Perbandingan Fasilitas Perpajakan pada FTZ dan KEK

No	Jenis Fasilitas	FTZ	KEK
1.	Fasilitas PPH Badan	---	---
	a. *Investment Allowance*	x	√
	b. Amortisasi dipercepat	x	√
	c. Pajak *Dividen*	x	√
	d. Kompensasi kerugian yang lebih lama	x	√
	e. *Tax Holiday*	x	√
2.	Fasilitas Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	√	√
3.	Fasilitas PPN dan PPnBM	---	---

	a. PPN impor tidak dipungut	√	√
	b. PPN tidak dipungut atas pembelian dalam negeri	√	√
	c. Pembebasan PPN dan/atau PPnBM	√	√
	d. Penyerahan tidak dipungut kepada penerima fasilitas lainnya	√	√
	e. Pengembalian PPN kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri	x	√
4.	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai	---	---
	a. Penangguhan Bea Masuk	x	√
	b. Pembebasan Bea Masuk	√	√
	c. Pembebasan Cukai	√	√

(Sumber: http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singk at/Info%20Singkat-VIII-6-II-P3DI-Maret-2016-4 4.pdf).

Namun, keistimewaan baru yang diberikan di zona KEK seperti yang terlihat pada Tabel 1.1, nantinya hanya diberikan kepada investor baru dan investor yang melakukan perluasan usaha di zona KEK yang telah ditetapkan DK. Investor yang ada saat ini tetap mendapatkan fasilitas sebagaimana yang didapatkan saat Batam masih berstatus FTZ. Namun, apabila investor tersebut melakukan relokasi atau perluasan ke zona KEK maka fasilitas yang akan didapatkan jauh lebih baik dan lebih banyak dari yang sekarang. Sementara, industri yang berada di luar kawasan atau yang berada di tengah-tengah pemukiman warga, fasilitas yang mereka dapatkan tetap sama saat Batam bertatus FTZ (berkas.dpr.go.id/.../info_singkat/Info%20Singkat-VIII-6-II-P3DI-Maret-2016-44.pdf diakses pada 11 Juli 2017).

Melihat pentingnya hubungan kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura mengenai *Special Economic Zone* di wilayah Batam, Bintan dan Karimun maupun hubungan kerjasama regional mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang mempengaruhi bidang-bidang strategis manusia seperti masalah kesejahteraan ekonomi, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul: "**Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura (*Special Economic Zone*) di Wilayah Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community* Tahun 2006-2017".**

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

"Bagaimana Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di wilayah Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community* Tahun 2006-2017?"

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Bagaimana kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di wilayah Batam, Bintan dan Karimun sebelum diberlakukannya *ASEAN Economic Community*?
2. Bagaimana aktifitas kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di Wilayah Batam, Bintan dan Karimun sampai dengan diberlakukannya *ASEAN Economic Commnunity*?
3. Apa kendala kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di wilayah Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community*?
4. Bagaimana prospek perkembangan Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di wilayah Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community*?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di wilayah Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community.*

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di wilayah Batam, Bintan dan Karimun sebelum

diberlakukannya *ASEAN Economic Community*.

2. Untuk mengetahui bagaimana aktifitas kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di Wilayah Batam, Bintan dan Karimun sampai dengan diberlakukannya *ASEAN Economic Commnunity*
3. Untuk mengetahui apa kendala kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di wilayah Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community*
4. Untuk mengetahui bagaimana prospek perkembangan kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di wilayah Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan atau menambah pembedaharaan pustaka, serta dapat memberikan sumbangan bagi Ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional terutama mengenai Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di wilayah Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community* Tahun 2006-2017.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Semoga penelitian ini dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Bagi lembaga akademik sebagai bahan referensi dalam hubungannya dengan studi Hubungan Internasional.
3. Bagi mahasiswa dan umum, semoga menjadi sumber referensi dalam penulisan makalah, jurnal ilmiah, dan skripsi.

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional dapat terjadi, karena terdapat faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di setiap negara, hal inilah yang dapat mendorong terjadinya kerjasama antar negara.

Hubungan Indonesia-Singapura mempunyai arti yang sangat penting bagi kepentingan nasional Indonesia maupun kepentingan kawasan. Dari segi kepentingan nasional, hubungan bilateral kedua negara yang erat, produktif, dan saling menguntungkan mutlak diperlukan dan harus terus diupayakan terutama guna menciptakan lingkungan eksternal yang menunjang bagi kepentingan pembangunan nasional Indonesia. Besarnya komplementaritas kepentingan ekonomi di antara kedua negara harus secara strategis terus dikembangkan terutama dalam rangka menunjang upaya pembangunan ekonomi Indonesia. Sementara itu, dari kepentingan kawasan, Indonesia dituntut untuk memberikan prioritas dan perhatian pada pembinaan dan penguatan hubungan, kerja sama serta solidaritas ASEAN, dan dalam hal ini hubungan bilateral yang baik dan erat antara Indonesia dan Singapura merupakan salah satu prasyarat untuk mencapai tujuan tersebut. Singapura adalah negara sahabat dan secara fisik geografis merupakan tetangga dekat Indonesia. Oleh karena itu, hubungan dan kerja sama antara kedua negara terwujud dalam berbagai bidang kehidupan, terutama yang menonjol adalah di bidang ekonomi dimana Singapura adalah mitra dagang utama, sumber investasi asing terbesar, dan juga asal wisatawan asing terbesar bagi Indonesia.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan sebuah desain atau rancangan yang berisi rumusan tentang objek yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini

dipilih karena penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti di bidang ilmu sosial dan politik, penelitian dalam metode ini tidak menggunakan analisis berupa grafik, bilangan dan numeral berdasarkan prosedur statistik. Penelitian dalam metode ini menyoroti masalah terkait kerjasama dari suatu negara di kancah internasional. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti hanya melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, dan *Embassy of The Republic of Singapore* dan diimplementasikan dengan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

3.2 Informan Penelitian

Teknik Penentuan informan yang dipakai peneliti adalah dengan menggunakan teknik penentuan *Purposive*. Peneliti menentukan pihak-pihak informan berdasarkan tujuan, masalah dan variabel penelitian. Teknik yang digunakan adalah teknik wawancara sesuai dengan masalah yang diteliti. Berkaitan dengan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, dan *Embassy of The Republic of Singapore* untuk mengetahui bagaimana kerjasama yang dilakukan Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di wilayah Batam, Bintan, Dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community* tahun 2006-2017.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, penelusuran data *online*, dokumentasi, dan wawancara. Hal ini dikarenakan penelitian ini difokuskan pada Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura (*Special Economic Zone*) di wilayah Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community* Tahun 2006-2017 dengan mengolah data-data yang diperoleh dari sumber yang relevan secara mendalam.

3.3.1 Studi Pustaka

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui tulisan, artikel yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, dan *Embassy of The Republic of Singapore* serta menelaah teori, opini, membaca buku atau jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti juga menggunakan layanan internet dengan cara mengakses alamat situs berita *online* seperti detiknews, okezone, kompas dan situs berita lainnya serta situs resmi Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, dan *Embassy of The Republic of Singapore* dalam melakukan pengumpulan data terkait penelitian yang akan dilakukan serta situs-situs lain terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu peneliti juga menggunakan metode dokumentasi, yakni mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang dikeluarkan oleh lembaga terkait.

3.3.2 Studi Lapangan

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai narasumber yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti. Narasumber terkait dengan judul peneliti yaitu Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, dan *Embassy of The Republic of Singapore* terkait masalah Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura (*Special Economic Zone*) di wilayah Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community* Tahun 2006-2016.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1.1 Tinjauan Umum Hubungan Bilateral Indonesia-Singapura

Pada dasarnya secara politik, Indonesia dan Singapura mengalami guncangan yang didasari kepentingan nasionalnya, tetapi kedua negara mempunyai fondasi dasar yang cukup kuat untuk

membangun dan meningkatkan hubungannya. Secara ekonomi, Singapura saat ini telah tumbuh menjadi negara yang mempunyai kekuatan ekonomi, karena Singapura menjadi perlintasan transaksi jasa ekonomi dunia. Dengan demikian peningkatan hubungan kerjasama Indonesia dan Singapura merupakan bagian dari pendekatan *good neighbour policy* yang juga sebagai peluang kerjasama untuk saling mengungtungkan satu sama lain (http:// www.setneg.go.id/index.php?option=com_content &task=view&id=4159&Itemid=29 diakses pada 30 Juli 2017).

Kerangka kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura di pulau Batam, Bintan dan Karimun juga merupakan suatu kebijakan yang sangat tepat sebagai upaya guna memenuhi kepentingan nasional yang diantaranya dapat menarik investasi asing, memperluas ekspor dan meningkatkan devisa secara produktif, menyediakan kesempatan atau lapangan pekerjaan, mencapai *transfer technology* dan keterampilan manajemen, memanfaatkan secara lebih efisien sumber daya material dalam negeri dan menciptakan jaringan dengan sektor dalam negeri maupun luar negeri, serta merangsang pertumbuhan ekonomi di sebuah negara.

Dalam konteks hubungan kerjasama ekonomi, Indonesia dan Singapura yang saling melengkapi satu sama lain dan juga mempunyai tingkat komplementaritas tinggi dimana Indonesia mempunyai sumber daya manusia dan sumber daya alam yang besar dibandingkan dengan Singapura yang mempunyai *knowledge, networking, financial resources* dan juga *technological advance*. Dengan demikian kondisi tersebut membuat Indonesia dan Singapura saling membutuhkan dan juga saling melengkapi satu sama lain. Di bidang sosial budaya, Indonesia dan Singapura juga telah mendorong berbagai usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan hubungan kerjasama pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata serta hubungan *people to people contact*.

4.1.1.2 Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di Wilayah Batam, Bintan dan Karimun

Dalam bidang Ekonomi, Singapura telah tumbuh dan berkembang menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar, disamping itu Singapura juga menjadi perlintasan transaksi jasa ekonomi dunia. Peningkatan hubungan kerjasama Indonesia Singapura sebagai bagian dari upaya pendekatan *good neighbour policy* merupakan peluang kerjasama yang saling mengungtungkan (http://www.Setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4159 diakses pada 13 Agustus 2017).

Sejak ditandatanganinya perjanjian kerangka kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan KEK, Indonesia dan Singapura terus berupaya untuk meningkatkan kerjasamanya. Sebagai usaha dalam merealisasikan kerjasama tersebut, Indonesia dan Singapura membentuk tim perumus *Joint Steering Committee* dan juga melakukan upaya pengembangan KEK melalui *Joint Working Group* yang diketuai Menteri Perdagangan RI, Maria Elka Pangestu dan Ketua Pengembangan Ekonomi Singapura, Mr. Lim Siong Guan. Selain itu terkait dengan pengembangan *Special Economic Zone* di Kota Batam, Bintan, dan Karimun, pada tanggal 25 Juli 2006 diberlakukan pelayanan *One Stop Service* yang bertempat di Gedung Promosi Sumatera Batam Center. Pelayanan ini berkaitan dengan izin dari Otorita Batam dan Dispenda. Adapun izin usaha dari Otorita Batam antara lain: persetujuan perizinan PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), perizinan fatua planologi, pengurusan surat keterangan asal (*Certificate of Origin*), pengurusan izin pematangan lahan dan rekomendasi Tenaga Kerja Asing (www.bi.go.id/id/publikasi/kajian.../ 26114a23a9db4bc29cc6f3111de0a568Boks2.pdf diakses pada 03 Apil 2017).

Pendirian SEZ sendiri dapat pula bertujuan untuk pengembangan fasilitas infrastruktur kelas dunia, penciptaan kesempatan kerja, promosi investasi dari sumber daya dalam negeri, promosi ekspor barang dan jasa, dan turunan kegiatan ekonomi tambahan lainnya.12 Sedangkan menurut pendapat Xu Dixin dalam kerangka teoritis, SEZ memiliki fungsi yang spesifik seperti:

1. Untuk melayani dan merupakan jembatan dalam memperkenalkan modal asing, teknologi canggih, peralatan, dan sebagai ruang pembelajaran untuk pelatihan personil yang mampu menguasai teknologi canggih;
2. Untuk mempromosikan kompetisi antar wilayah, antar perdagangan, dan juga mempromosikan sebuah perdagangan tertentu, sebagai usaha untuk akhir yang lebih besar dalam mengembangkan perekonomian negara dan mempercepat produksi serta meningkatkan kualitas manajemen;
3. Untuk menyerap devisa dan untuk menyaring bagian dari modal asing, teknologi, dan peralatan melalui SEZ;
4. Untuk melayani sebagai sebuah unit eksperimen dalam reformasi struktural ekonomi dan sebagai pendidikan untuk mempelajari law of value and the regulation of production according to market demands (pengaturan produksi sesuai dengan permintaan pasar); dan
5. Untuk mempekerjakan banyak orang yang memang menunggu untuk adanya pekerjaan (www.lontar.ui.ac.id/file?file =digital/135750-T+27997-Pengalihan+ status...pdf diakses pada 03 April 2017).

4.1.1.3 *ASEAN Economic Community*

Indonesia termasuk salah satu negara dalam *ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang bergulir mulai akhir tahun 2015 lalu. Masyarakat Ekionomi ASEAN merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang sebelumnya telah disebut dalam *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* pada tahun 1992. Pada pertemuan tingkat Kepala Negara ASEAN (*ASEAN Summit*) ke-5 di Singapura pada tahun 1992 tersebut para kepala negara mengumumkan pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN yaitu *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dalam jangka waktu 15 tahun. Kemudian dalam perkembangannya dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002 (http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-pere konomian-indonesia diakses pada 28 Juli 2017).

Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN. Saat itu, ASEAN meluncurkan inisiatif pembentukan integrasi kawasan ASEAN atau komunitas masyarakat ASEAN melalui ASEAN Vision 2020 saat berlangsungnya *ASEAN Second Informal Summit.* Inisiatif ini kemudian diwujudkan dalam bentuk *roadmap* jangka panjang yang bernama *Hanoi Plan of Action* yang disepakati pada 1998.

Pada KTT selanjutnya Indonesia merupakan salah satu inisiator pembentukan MEA yaitu dalam Deklarasi *ASEAN Concord II* di Bali pada 7 Oktober 2003 dimana para petinggi ASEAN mendeklarasikan bahwa pembentukan MEA pada tahun 2015. Pembentukan Komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu juga merupakan upaya evolutif ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak pada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN, yaitu: saling menghormati (*Mutual Respect*), tidak mencampuri urusan dalam negeri (*Non-Interfence*), konsensus, diaog dan konsultasi. Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar yang termasuk di dalamnya kerjasama di bidang ekonomi, yaitu: Komonitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Comunity/ASC*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Sosio-Cultural Community/ASCC*). Tujuan dibentuknya MEA untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN, serta diharapkan mampu

mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar negara ASEAN. Selama hampir dua dekade, ASEAN terdiri dari hanya lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand yang pendiriannya pada tahun 1967. Negara-negara Asia Tenggara lainnya yang tergabung dalam waktu yang berbeda yaitu Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997), dan Kamboja (1999) (http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia diakses pada 28 Juli 2017).

Dampak terciptanya MEA adalah terciptanya pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Konsekuensi atas kesepakatan MEA yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Dari karakter dan dampak MEA tersebut di atas sebenarnya ada peluang dari momentum MEA yang bisa diraih Indonesia. Dengan adanya MEA diharapkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Salah satunya pemasaran barang dan jasa dari Indonesia dapat memperluas jangkauan ke negara ASEAN lainnya. Pangsa pasar yang ada di Indonesia adalah 250 juta orang. Pada MEA, pangsa pasar ASEAN sejumlah 625 juta orang bisa disasar oleh Indonesia. Jadi, Indonesia memiliki kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar yang lebih luas. Ekspor dan impor juga dapat dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Tenaga kerja dari negara-negara lain di ASEAN bisa bebas bekerja di Indonesia. Sebaliknya, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga bisa bebas bekerja di negara-negara lain di ASEAN. Dampak positif lainnya yaitu investor Indonesia dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada batasan ruang antar negara anggota ASEAN. Begitu pula kita dapat menarik investasi dari para pemodal-pemodal ASEAN. Para pengusaha akan semakin kreatif karena persaingan yang ketat dan para professional akan semakin meningkatkan tingkat *skill*, kompetensi dan profesionalitas yang dimilikinya (http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia diakses pada 28 Juli 2017).

4.2 Analisa Hasil Penelitian & Pembahasan

4.2.1 Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura dalam Pengembangan *Special Economic Zone* di Wilayah Batam, Bintan dan Karimun Sebelum diberlakukannya *ASEAN Economic Community*

Sebelum diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sebagai usaha dalam merealisasikan kerangka kerjasama ekonomi Indonesia dan Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* (SEZ) di wilayah Batam, Bintan dan Karimun, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan dan Karimun dibentuk tim perumus *Joint Steering Committee* yang saat itu diketuai oleh Menko Perekonomian RI Boediono dan Menteri Ekonomi Singapura Lim Hing Kiang. Sedangkan pada pelaksanaannya SEZ dilakukan oleh *Joint Working Group* yang pada saat itu diketuai oleh Menteri Perdagangan RI, Maria Elka Pangestu dan Ketua Pengembangan Ekonomi Singapura, Mr. Lim Siong Guan. Terkait dengan pengembangan *SEZ* di Kota Batam, Bintan, dan Karimun, pada tanggal 25 Juli 2006 diberlakukan pelayanan *One Stop Service* atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertempat di Gedung Promosi Sumatera Batam Center. Pelayanan ini berkaitan dengan izin dari Otorita Batam dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Adapun izin usaha dari Otorita Batam antara lain, persetujuan perizinan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), perizinan fatua planologi, pengurusan surat keterangan asal (*Certificate of Origin*), pengurusan izin pematangan lahan dan rekomendasi Tenaga Kerja Asing (www.bi.go.id/id/publikasi/kajian.../26114a23a9db4bc29cc6f3111de 0a568Boks2.pdf diakses pada 03 Apil 2017).

4.2.2 Aktifitas kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di Wilayah Batam, Bintan

dan Karimun sampai dengan diberlakukannya *ASEAN Economic Commnunity*

Sejak penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tanggal tanggal 25 Juni 2006 mengenai kerangka kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan KEK, Indonesia dan Singapura terus meningkatkan kerjasamanya. Sebagai usaha dalam merealisasikan kerjasama tersebut, dibentuk tim perumus *Joint Steering Committee* dan juga melakukan upaya pengembangan KEK melalui *Joint Working Group* yang diketuai Menteri Perdagangan RI, Maria Elka Pangestu dan Ketua Pengembangan Ekonomi Singapura, Mr. Lim Siong Guan. Selain itu terkait dengan pengembangan *Special Economic Zone* di Kota Batam, Bintan, dan Karimun, pada tanggal 25 Juli 2006 diberlakukan pelayanan *One Stop Service* yang bertempat di Gedung Promosi Sumatera Batam Center. Pelayanan ini berkaitan dengan izin dari Otorita Batam dan Dinas Pendapatan Daerah. Adapun izin usaha dari Otorita Batam antara lain: persetujuan perizinan PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), perizinan fatua planologi, pengurusan surat keterangan asal (*Certificate of Origin*), pengurusan izin pematangan lahan dan rekomendasi Tenaga Kerja Asing (www.bi.go.id/id/publikasi/kajian.../26114a23a9db4bc29cc6f3111de0a568Boks2.pdf diakses pada 03 Apil 2017).

Pada tahun 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani peraturan pemerintah (PP) yang mengatur FTZ di Batam, Bintan, dan Karimun. Ketiga PP itu adalah PP No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, PP No 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Dan PP No 48 Tahun 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. (www.kemendagri.go.id/media/documents/2007/08/20/PP_No_47_th_2007.pdf diakses pada 14 Agustus 2017).

Dua tahun kemudian, tepatnya pada 17 November 2009 Menteri Perindustrian MS.Hidayat menyatakan Batam akan dialihkan dari FTZ menjadi KEK. Pernyataan ini kemudian terbukti sesuai dengan keluarnya UU No.39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (http://bisnis.vivanews.com/news/read/106279- diakses pada 14 Agustus 2017).

Pada tahun 2010 Indonesia dan Singapura sepakat membentuk enam kelompok kerja (*Six Working Group*) guna meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi antara kedua Negara di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Selain itu, juga dilakukan peningkatan investasi, peningkatan kerja sama bidang transportasi udara, peningkatan kerjasama pariwisata, kerjasama di bidang tenaga kerja, serta kerjasama di bidang bisnis pertanian (https://news.detik.com/berita/d-1358839/pertemuan-presiden-sby-pm-lee-sepakati-peningkatan-kerjasama-ekonomi diakses pada 28 Juli 2017).

Pada tahun 2013, *Working Group* KEK telah menyelenggarakan 2 kali *workshop* yang difasilitasi oleh *Singapore Ministry of Manpower* di Batam dan Bintan, dan 1 kali *workshop* di Karimun pada tahun 2014. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan persamaan persepsi dalam hubungan kerjasama industrial diantara pekerja (serikat pekerja), *Human Resource Management* dan pemerintah dan juga *Workshop* ini dilaksanakan guna membangun hubungan industrial yang harmonis dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Sementara itu di tahun 2014 tepatnya pada hari Selasa, 11 Februari telah dilaksanakan Pertemuan Tingkat Menteri *Working Group* Ekonomi Indonesia dan Singapura di Grand Copthorne Waterfront Hotel, Singapura. Dalam pertemuan dibahas perkembangan kerjasama bilateral di *Six Working Groups* yaitu Batam, Bintan, Karimun (BBK) and other *SEZs; Investment; Air Connectivity; Tourism; Manpower*, dan *Agribusiness*, serta isu-isu kerjasama ekonomi bilateral lainnya (https://ekon.go.id/ekliping/download/998/430/dummy-tek-feb-2014.pdf diakses pada 14 Agustus 2017).

Selanjutnya pada tahun 2013, *Working Group* Batam, Bintan dan Karimun telah menyelesaikan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas bagi pegawai di Badan

Pengusahaan Batam, Badan Pengusahaan Bintan dan Badan Pengusahaan Karimun.

Pada akhir tahun 2015 perkembangan kerjasama regional ASEAN guna mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan, dibuktikan dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah disepakati oleh Negara anggota ASEAN termasuk Indonesia dan Singapura (kemlu, 2015: 39).

Namun disamping terjalinya kerjasama regional, kerjasama bilateral antar Negara anggota kawasan tetap dibutuhkan. Pada tanggal 12 Januari 2016 Pemerintah Indonesia dan Singapura memperkuat kerja sama bilateral di berbagai bidang, antara lain di bidang ekonomi, khususnya di sektor agrobisnis dan infrastruktur (https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160112185225-106-103835/ri-dan-singapura-perkuat-kerja-sama-ekonomi/ diakses pada 14 Agustus 2017).

Dalam hubungan kerjasama ekonomi, Indonesia-Singapura saling melengkapi dan memiliki tingkat komplementaritas yang tinggi. Indonesia memilki sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang besar sedangkan Singapura memiliki kemampuan pengetahuan dan teknologi tinggi, jaringan ekonomi serta sumber daya keuangan yang besar. Kondisi ini menjadikan Indonesia dan Singapura saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain.

4.2.3 Kendala Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di Wilayah Batam, Bintan, dan Karimun Setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community*

Pemerintah ingin meningkatkan daya tarik investor untuk berinvestasi di wilayah Batam, Bintan dan Karimun salah satunya dengan berencana mengubah kawasan tersebut yang berstatus FTZ menjadi KEK. Namun, berdasarkan analisis Tim Teknis Badan Pengusahaan Batam, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam pengembangan kawasan tersebut. Terdapat beberapa persoalan ketidakjelasan dan *overlapping* terkait dengan Batam. Hal tersebut dapat mengubah *time frame* yang telah dibuat. Darmin menilai perubahan Batam menjadi KEK penting karena FTZ sudah tidak lagi relevan pada era MEA. Untuk menyelesaikan masalah itu, pemerintah akan melakukan penyelesaian aset dan pelaksanaan perizinan secara terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Stop Service*) serta penyederhanaan pelayanan kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, menurut Darmin, penyelesaian kebijakan pengelolaan lahan dan tata ruang juga akan dilakukan. Saat ini, pemerintah telah sepakat untuk menyelesaikan tumpang tindih lahan dan aset yang ada di Batam. Pemerintah Kota dan BP Batam pun telah berkomitmen untuk bersinergi terkait dengan pelepasan aset. Dalam hal perizinan, keduanya juga telah sepakat agar hal itu bisa menjadi insentif bagi dunia usaha, khususnya investor. Terlebih, Batam memiliki potensi untuk bisa bersaing dengan negara tetangga (https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/06/03/090776492/bakal-jadi-kek-perizinan-di-batam-akan-diintegrasikan diakses pada 301 Juli 2017).

Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Batam adalah salah satu kawasan spesial untuk dapat menjadi KEK. Daerah ini memiliki perbedaan yang mendasar dengan KEK lainnya. Salah satunya adalah dalam hal pemukiman penduduk. Permukiman Batam sudah terlanjur ada di mana-mana. Padahal sebenarnya dalam KEK itu permukimannya terpisah. Menurut Darmin, ciri ini tetap tidak dapat dihilangkan. Apabila pemerintah menggusur pemukiman penduduk, maka hal ini menimbulkan persoalan tersendiri dalam pengembangan KEK Batam, dengan keadaan tersebut, maka butuh waktu yang cukup lama untuk pengembangan pembangunan. Rencana dibentuknya KEK dikarenakan FTZ sudah tidak kompetitif lagi. Karena setelah MEA berlaku, barang dari Malaysia atau Singapura bisa masuk ke Batam dengan bea masuk rendah. Semenatara di sendiri FTZ tidak demikian, maka dari itu perubahan dari FTZ ke sangat diperlukan (http://economy.okezone.com/

read/2016/09/19/320/1493329/ini-beda-batam-dengan-kawasan-ekonomi-khusus-yang-lain diakses pada 30 Juli 2017).

4.2.4 Prospek Perkembangan Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura dalam Pengembangan *Special Economic Zone* di Wilayah Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community*

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi akitivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. Untuk ide ini terinspirasi dari keberhasilan beberapa negara yang lebih dulu mengadopsinya, seperti Tiongkok dan India. Bahkan data-data empiris melukiskan bahwa KEK di negara tersebut mampu menarik para investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. Hal itu tak lain karena kemudahan yang didapat para investor, kemudahan itu berbentuk kemudahan di bidang fiskal, insentif kepabeanan (pembebasan, pengurangan tarif, atau penyederhanaan prosedur cukai atau bea masuk), insentif penanaman modal (menyederhanakan syarat dan prosedur), serta insentif perlindungan lingkungan hidup. Selain Indonesia, telah banyak negara yang berusaha menarik investor asing dengan menerapkan KEK untuk menggairahkan perekonomian negara tersebut. Bahkan ada juga di bidang non-fiskal, seperti kemudahan birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian, serta pelayanan yang efisien dan ketertiban di dalam kawasan.

Pengambilan keputusan pemerintahan suatu negara dalam menetapkan suatu wilayah sebagai KEK didasari kepada keunggulan yang dimiliki oleh kawasan tersebut yang umumnya memiliki:

1. Keunggulan geografis, letak suatu kawasan yang sangat dekat dengan negara tetangga/perbatasan dan atau jalur perdagangan dunia dengan beragam kekhususannya orientasi ekspor, substitusi impor, dan lain sebagainya.
2. Sumber daya alam, sumber alam tertentu merupakan daya tarik tersendiri dalam penetapan suatu wilayah menjadi KEK. Dan Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak sumber alam yang kaya perlu membuat *cluster* KEK di berbagai daerah sehingga setiap daerah memiliki pusat perekonomian tersendiri dalam konteks KEK (www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-107-2150-20092007.pdf diakses pada 12 Agustus 2017).

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan iklim investasi di kota Batam yang dinilai mulai kurang menjanjikan karena konflik perburuhan dan dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, langkah yang diambil pemerintah adalah melakukan transformasi atas FTZ Batam menjadi KEK. Namun demikian, pembangunan KEK Batam tidak akan terlepas dari beberapa permasalahan. Pada akhirnya yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program pengembangan KEK adalah relevansi program tersebut dalam konteks spesifik, serta seberapa efektif program tersebut dirancang, diimplementasikan, serta dikelola secara berkelanjutan.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai kristalisasi atas pemaparan dari tiga rumusan masalah yang ada, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam konteks hubungan bilateral kerjasama ekonomi Indonesia dan Singapura saling melengkapi satu sama lain dan juga mempunyai tingkat komplementaritas tinggi dimana Indonesia mempunyai sumber daya manusia dan sumber daya alam yang besar dibandingkan dengan Singapura yang

mempunyai *knowledge*, *networking*, *financial resources* dan juga *technological advance*.

2. Sebagai usaha dalam merealisasikan kerangka kerjasama ekonomi Indonesia dan Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* (SEZ) di wilayah Batam, Bintan dan Karimun, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan dan Karimun dibentuk tim perumus *Joint Steering Committee* dan *Joint Working Group*. Terkait dengan pengembangan *special economic zone* di Kota Batam, Bintan, dan Karimun, pada tanggal 25 Juli 2006 diberlakukan pelayanan *One Stop Service* atau Pelayanan Terpadu Satu. Pada tahun 2010 Indonesia dan Singapura sepakat membentuk enam kelompok kerja (*Six Working Group*) guna meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi antara kedua Negara di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.
3. Terdapat beberapa persoalan ketidakjelasan dan *overlapping* terkait dengan Batam. Hal tersebut dapat mengubah *time frame* yang telah dibuat. Perubahan Batam menjadi KEK penting karena FTZ sudah tidak lagi relevan pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Permukiman Batam sudah terlanjur ada di mana-mana. Padahal sebenarnya dalam KEK itu permukimannya terpisah.
4. Dualisme pengelolaan wilayah menyebabkan Batam tidak kompetitif karena perizinan menjadi lamban, tumpang tindih pengelolaan tanah, kepastian hukum bagi investor, dan penyediaan infrastruktur yang belum memenuhi standar internasional. Hal tersebut juga yang menjadi faktor status FTZ Batam akan beralih ke KEK.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan beberapa saran mengenai Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan *Special Economic Zone* di Wilayah Batam, Bintan, dan Karimun yaitu:

1. Kerjasama sangat berperan di dalam hubungan internasional. Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura perlu ditingkatkan dan lebih diperhatikan lagi. Kerjasama dilakukan dan diperlukan oleh Negara sebagai sarana untuk mencapai kepentingan nasional dalam menjalin hubungan antar bangsa.
2. Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan perlu menyelenggarakan program studi banding ke beberapa negara yang telah berhasil menerapkan KEK dengan segala model dan sistemnya. Melakukan penelitian-penelitian, *survey* secara berkala menganai kemajuan pelaksanaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, menyelenggarakan seminar, workshop, pelatihan dan sebagainya sebagai upaya sosialisasi dan membuka wawasan bagi masyarakat dan pemerintah.
3. Pemerintah harus lebih tegas dan lebih memperhatikan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di Wilayah Batam, Bintan dan Karimun. Melakukan upaya-upaya untuk mensosialisasikan keuntungan daerah potensial tersebut jika beralih dari FTZ ke KEK. Dan juga pemerintah harus segera mungkin merealisasikan kawasan tersebut menjadi KEK karena telah diketahui bahwa KEK lebih unggul dalam menciptakan iklim investasi dan perdagangan di wilayah tersebut, terlebih saat ini sudah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Kemlu, 2015. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Sekretariat Nasional ASEAN, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Perwita, A.A Banyu, dan Yanyan Moch. Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Menon, S. Narayan., dan Soumya Kanti Mitra. 2009. *Special Economic Zones The Rasional*. New Delhi. Centre for Policy Research

B. DOKUMEN

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan Dan Pulau Karimun

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 74 tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam

Undang-undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

C. RUJUKAN ELEKTRONIK

Sejarah Singkat Batam. Melalui http//www.skpd.batamkota.go.id/bapeda/files/2010/01/4.Sejarah-Singkat.pdf

Indonesia dan Singapura Tandatangani Kerangka Kerjasama Ekonomi Untuk Pulau Batam, Bintan dan Karimun. Melalui http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-dan-Singapura-Tandatangani-Kerangka-Kerjasama-Ekonomi-untuk-Pulau-Batam-Bintan-dan-Karimun.aspx

Ekonomi dan Kebijakan Publik. Melalui berkas.dpr.go.id/.../info_singkat/Info%20Singkat-VIII-6-II-P3DI-Maret-2016-44.pdf

Mencermati Peluang Hubungan Kerjasama Bilateral Indonesia-Singapura. Melalui http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4159&Itemid=29

Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Perekonomian Indonesia. Melalui http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia\

Batam Jadi Kawasan Ekonomi Khusus Pekan Depan. Melalui http://bisnis.vivanews.com/news/read/106279-

Pertemuan Presiden SBY PM Lee Sepakati Peningkatan Kerjasama Ekonomi. Melalui https://news.detik.com/berita/d-1358839/pertemuan-presiden-sby-pm-lee-sepakati-peningkatan-kerjasama-ekonomi

Working Group Ekonomi Indonesia-Singapura. Melalui https://ekon.go.id/berita/view/working-group-ekonomi.528.html

Perspektif Pengusaha Terhadap Kawsan Ekonomi Khusus. Melalui www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-107-2150-20092007.pdf